DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



EDISI SENIN, 19 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Fraksi PDIP Sebut Gaji ASN Lewat Kopdes Bisa Ganggu Birokrasi



Hj. Zeiniye, S.Ag, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PPP, saat menghadiri Dies Natalis ke-21 SMKN 1 Kendit, Sabtu (17/10). saiaswi/bhirawa

DPRD Jatim, Bhirawa

Wacana Kementerian Koperasi yang meminta gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dibayarkan melalui Koperasi Merah Putih dinilai kebijakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Penegasan ini dikatakan Ketua Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno.

Menurutnya penataan penyaluran gaji ASN yang berjalan saat ini, melalui bank daerah untuk ASN tingkat daerah dan bank Himbara untuk ASN pusat, sudah sangat baik dan ideal.

"Banyak hal yang masih belum ada kesiapan bila pembayaran gaji ASN dilakukan di Koperasi Merah Putih. Ini akan menimbulkan kegaduan bila dipaksakan," ujar Untari, Minggu (18/10).

Kata mantan Ketua Dekopin ini, ada beberapa alasan mendasar mengapa wacana ini dinilai belum tepat untuk diterapkan. Pertama kapasitas pengurus belum memadai, dimana pengurus Koperasi Merah Putih dinilai masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dan menjalankan tugas kepengurusan dengan baik.

Kedua, minimnya pengalaman manajemen di lapangan, dimana manajemen yang telah dilatih masih belum banyak terjun langsung ke wilayah koperasi masing-masing secara optimal.

Lalu yang lainnya lanjut politisi senior PDIP ini, infrastruktur belum siap. Pasalnya dari kondisi dilapangan, kesiapan infrastruktur perkoperasian Merah Putih belum memadai, karena sebagian besar baru melakukan praktik di beberapa atau belasan koperasi saja dari ribuan koperasi yang ada.

"Ini bila dipaksakan akan berpotensi menggangu rutinitas penerimaan gaji ASN di tingkat desa atau daerah yang biasanya berjumlah belasan orang (baik PNS, P3K, maupun PKWT)," tegasnya.

Melihat berbagai kendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang ada, Sri Untari meminta Kementerian Koperasi untuk mengkaji ulang serta menelaah kembali pandangan dan wacana tersebut.

Untari berharap para ASN dapat terus bekerja secara tenang dan optimal sesuai dengan sistem perbankan yang selama ini sudah mapan di masing-masing daerah, guna menghindari potensi kendala yang justru dapat merepotkan berbagai pihak. **[geh.dre]**

Anggota DPRD Jatim Asal PPP Sebut SMK Solusi Tekan Angka Pengangguran

Situbondo, Bhirawa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Zeiniye, S.Ag menghadiri perayaan Dies Natalis ke-21 SMK Negeri 1 Kendit, Kabupaten Situbondo, Sabtu (27/10).

Dalam sambutannya, ia mengapresiasi berbagai capaian prestasi yang telah diukir oleh sekolah tersebut. Hj. Zeiniye menyampaikan bahwa meskipun secara regulasi pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (bukan DPRD), ia tetap berkomitmen untuk bersinergi antar jenjang pendidikan sangat diperlukan dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-21 SMKN 1 Kendit. Sekolah ini ibarat 'bintang' meski letaknya agak masuk dan mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, ternyata menyimpan potensi luar biasa dan telah mengukir banyak prestasi," ujar Hj. Zeiniye.

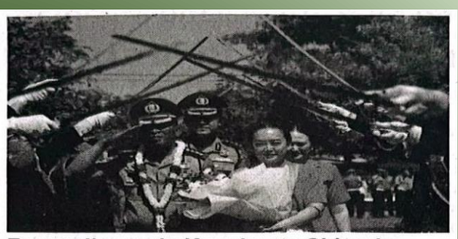
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jawa Timur IV (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) ini menegaskan pentingnya peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menekan angka pengangguran di Jawa Timur.

Menurutnya, Pemprov Jatim saat ini terus mendorong pengembangan SMK agar lulusannya siap kerja dan mampu berwirausaha.

"SMK adalah salah satu solusi strategis untuk mengatasi pengangguran. Tolok ukur kesuksesan saat ini bukan hanya menjadi ASN atau mendudukl jabatan di pemerintahan, tetapi sejauh mana seseorang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menggerakkan roda perekonomian," tegasnya.

Ia juga mengajak para siswa untuk terus mengasah keterampilan (skill) dan memanfaatkan teknologi informasi secara positif agar mampu bersaing di era digital.

"Perayaan Dies Natalis ke-21 ini diharapkan menjadi momentum bagi SMKN 1 Kendit untuk semakin menunjukkan bakat, talenta, dan potensi para siswanya kepada masyarakat luas," pungkas Ketua DPC PPP Situbondo, tiga periode itu. **[awi.dre]**



Farewell parade Kapolresta Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Diganti AKBP Bobby A Condroputra

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo menggelar upacara Farewell Parade dalam rangka pisah sambut Kapolresta Sidoarjo, Minggu (18/10/2026). Kegiatan ini menjadi momen penyambutan AKBP Bobby A. Condroputra sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru, sekaligus melepas Kombes Christian Tobing yang selanjutnya bertugas di SSDM Polri.

Upacara yang berlangsung di Mako Polresta Sidoarjo tersebut diikuti pejabat utama Polresta Sidoarjo, para kapolsek jajaran, personel kepolisian, aparatur sipil negara (ASN), serta Bhayangkari.

Sebelum memasuki gerbang Mako Polresta Sidoarjo, AKBP Bobby A. Condroputra bersama istri menerima pengalungan bunga. Keduanya disambut Wakapolresta Sidoarjo AKBP Fahrian Saleh Siregar.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tradisi pedang pora. Bobby dan istri berjalan melewati barisan pedang pora sebelum disambut Kombes Christian Tobing beserta istri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan laporan kesatuan dalam rangka serah terima jabatan Kapolresta Sidoarjo. (cat/rus)



Parkir Wajib Pakai QRIS Tahun Depan

ATURAN BARU: Parkir di Jalan Gajah Mada Sidoarjo yang selalu ramai wajib menggunakan QRIS pada 2027. DKY BANSIP/RADAR SIDOARJO

KOTA-Era parkir tunai di Kabupaten Sidoarjo bakal segera berakhir. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan seluruh sistem pembayaran parkir beralih ke digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2027. Petugas parkir yang menolak kebijakan tersebut diminta bersiap kehilangan pekerjaannya.

Subandi meminta seluruh juru parkir (jukir) mulai mempersiapkan diri mengikuti perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai.

Pemkab Sidoarjo tidak ingin penerapan digitalisasi parkir berjalan setengah-setengah. Subandi menegaskan, petugas parkir harus mengikuti kebijakan yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Jika tidak bersedia, pemerintah akan mengevaluasi hingga mengganti petugas yang bersangkutan.

"Mulai hari ini kita sampaikan persiapan untuk 2027. Kita semua sudah pakai QRIS, semuanya nontunai. Mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak mau, ya sudah, kita geser," ujar Subandi, Minggu (18/10).

Menurut Subandi, kebijakan tersebut perlu ditegaskan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah ingin memastikan seluruh petugas memahami aturan baru sebelum penerapannya diberlakukan secara menyeluruh.

Dia juga mengingatkan bahwa pekerjaan sebagai jukir berkaitan langsung dengan penghidupan keluarga. Karena itu, sosialisasi dan pembekalan perlu dilakukan agar para petugas bisa beradaptasi tanpa harus menghadapi konflik dengan pemerintah daerah.

Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan surat pernyataan berisi poin-poin kebijakan yang disampaikan dalam pengarahan tersebut. Surat itu menjadi bentuk komitmen petugas untuk

● Ke Halaman 10



ILUSTRASI/RADAR SIDOARJO

TRANSPORTASI: Bus sekolah gratis segera mengaspal di Sidoarjo.

Bus Sekolah Gratis Diresmikan saat Harjasda 2027

KOTA-Kabar gembira bagi pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Layanan bus sekolah gratis ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027 mendatang. Peluncurannya direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-168 pada 31 Januari 2027.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo kini mematangkan berbagai persiapan sebelum layanan tersebut resmi beroperasi. Mulai dari penyempurnaan armada, pemasangan fasilitas pendukung, pembangunan halte, hingga koordinasi dengan sekolah-sekolah yang masuk dalam jalur layanan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, rencana peluncuran bus sekolah gratis tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo Subandi. Bupati menghendaki peresmian layanan transportasi pelajar itu dilakukan bersamaan dengan momentum Harjasda.

"Untuk peluncuran resmi sudah kami laporkan kepada Pak Bupati. Beliau menghendaki peresmiannya dilakukan bertepatan dengan momentum Harjasda," ujar Budi, Minggu (18/10).

Dia menjelaskan, pengadaan fisik lima unit bus sekolah telah rampung sejak September 2026. Saat ini, Dishub tinggal menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar armada tersebut benar-benar siap digunakan.

Salah satu pekerjaan yang masih dilakukan adalah pemasangan pendingin udara atau Air Conditioner (AC). Dishub menargetkan seluruh penyempurnaan armada dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

"Pengadaan bus sekolah InsyaAllah sudah selesai. Tinggal ada penambahan beberapa fitur pendukung yang kami targetkan rampung pada akhir Desember mendatang," jelasnya.

Selain kesiapan armada, Dishub juga telah menetapkan rute perjalanan bus sekolah gratis. Sebanyak 15 halte disiapkan untuk menunjang layanan tersebut. Pembangunan halte kini masih berproses dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.

Belasan halte itu direncanakan tersebar di sejumlah kawasan padat penduduk, meliputi Kecamatan Gedangan, Sidoarjo Kota, Krian, Taman,

● Ke Halaman 10

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ILUSTRASI/AI/RADAR SIDOARJO

TRANSPORTASI: Bus sekolah gratis segera mengaspal di Sidoarjo.

Bus Sekolah Gratis Diresmikan saat Harjasda 2027

KOTA-Kabar gembira bagi pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Layanan bus sekolah gratis ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027 mendatang. Peluncurannya direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-168 pada 31 Januari 2027.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo kini mematangkan berbagai persiapan sebelum layanan tersebut resmi beroperasi. Mulai dari penyempurnaan armada, pemasangan fasilitas pendukung, pembangunan halte, hingga koordinasi dengan sekolah-sekolah yang masuk dalam jalur layanan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, rencana peluncuran bus sekolah gratis tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo Subandi. Bupati menghendaki peresmian layanan transportasi pelajar itu dilakukan bersamaan dengan momentum Harjasda.

"Untuk peluncuran resmi sudah kami laporkan kepada Pak Bupati. Beliau menghendaki peresmiannya dilakukan bertepatan dengan momentum Harjasda," ujar Budi, Minggu (18/10).

Dia menjelaskan, pengadaan fisik lima unit bus sekolah telah rampung sejak September 2026. Saat ini, Dishub tinggal menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar armada tersebut benar-benar siap digunakan.

Salah satu pekerjaan yang masih dilakukan adalah pemasangan pendingin udara atau Air Conditioner (AC). Dishub menargetkan seluruh penyempurnaan armada dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

"Pengadaan bus sekolah InsyaAllah sudah selesai. Tinggal ada penambahan beberapa fitur pendukung yang kami targetkan rampung pada akhir Desember mendatang," jelasnya.

Selain kesiapan armada, Dishub juga telah menetapkan rute perjalanan bus sekolah gratis. Sebanyak 15 halte disiapkan untuk menunjang layanan tersebut. Pembangunan halte kini masih berproses dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.

Belasan halte itu direncanakan tersebar di sejumlah kawasan padat penduduk, meliputi Kecamatan Gedangan, Sidoarjo Kota, Krian, Taman,

● Ke Halaman 10

Dipindai dengan CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

Bus Sekolah Gratis...

dan Porong. Untuk meratikan layanan tepat sasaran, Dishub juga berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang dilalui rute bus. Pihak sekolah nantinya turut berperan dalam menentukan siswa yang dapat memanfaatkan fasilitas transportasi gratis tersebut.

"Kami koordinasi dengan sekolah masing-masing yang dilalui kendaraan atau angkutan sekolah. Tentunya nanti sekolah punya standar dalam menentukan siswa yang bisa ikut angkutan sekolah," ungkap Budi.

Setiap bus sekolah memiliki kapasitas statis sebanyak 30 penumpang. Semen-tara itu, jumlah pelajar yang dapat terangkut selama perjalanan menyesuaikan kondisi naik-turun penumpang di setiap titik pemberhentian.

Dengan lima armada yang disiapkan, Dishub berharap layanan ini dapat membantu pelajar mengakses sekolah dengan lebih mudah.

Kehadiran bus sekolah gratis juga diharapkan menjadi alternatif transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa di Sidoarjo. **(dik/vga)**

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FENOMENA

Parkir Wajib Pakai QRIS Tahun Depan

ATURAN BARU: Parkir di Jalan Gajah Mada Sidoarjo yang selalu ramai wajib menggunakan QRIS pada 2027.

DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

KOTA-Era parkir tunai di Kabupaten Sidoarjo bakal segera berakhir. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan seluruh sistem pembayaran parkir beralih ke digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2027. Petugas parkir yang menolak kebijakan tersebut diminta bersiap kehilangan pekerjaannya.

Subandi meminta seluruh juru parkir (jukir) mulai mempersiapkan diri mengikuti perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai.

Pemkab Sidoarjo tidak ingin penerapan digitalisasi parkir berjalan setengah-setengah. Subandi menegaskan, petugas parkir harus mengikuti kebijakan yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Jika tidak bersedia, pemerintah akan mengevaluasi hingga mengganti petugas yang bersangkutan.

"Mulai hari ini kita sampaikan persiapan untuk 2027. Kita semua sudah pakai QRIS, semuanya nontunai. Mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak mau, ya sudah, kita geser," ujar Subandi, Minggu (18/10).

Menurut Subandi, kebijakan tersebut perlu ditegaskan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah ingin memastikan seluruh petugas memahami aturan baru sebelum penerapannya diberlakukan secara menyeluruh.

Dia juga mengingatkan bahwa pekerjaan sebagai jukir berkaitan langsung dengan penghidupan keluarga. Karena itu, sosialisasi dan pembekalan perlu dilakukan agar para petugas bisa beradaptasi tanpa harus menghadapi konflik dengan pemerintah daerah.

Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan surat pernyataan berisi poin-poin kebijakan yang disampaikan dalam pengarahan tersebut. Surat itu menjadi bentuk komitmen petugas untuk

● Ke Halaman 10

RADAR SIDOARJO.ID

Parkir Wajib Pakai...

mengikuti aturan digitalisasi parkir.

Tak hanya mengubah metode pembayaran, Pemkab Sidoarjo juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas parkir.

Dashboard monitoring dan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) bakal dioptimalkan untuk memantau aktivitas petugas sekaligus penerimaan retribusi parkir.

Dengan sistem digital, pemerintah berharap potensi kebocoran pendapatan daerah dapat diketahui lebih jelas. Tingkat kedisiplinan petugas juga bisa dipantau melalui data transaksi dan pengawasan di lapangan.

Digitalisasi ini sekaligus diharapkan membuat pengelolaan parkir lebih transparan dan akuntabel.

Setiap transaksi nontunai dapat menjadi bagian dari pencatatan penerimaan retribusi sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan manual. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

Kebakaran Dapur Rumah di Tarik Merembet ke Bangunan TK



TARIK-Kebakaran melanda dapur rumah milik warga di Dusun Tempuran, Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (18/10).

Api dilaporkan merembet hingga ke bangunan TK Islam Qairinah sebelum petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Krian melakukan pemadaman.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Bidang Pemadam Kebakaran, kebakaran terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Rumah yang terbakar

● Ke Halaman 10

Dipindai dengan CamScanner

IST

...JIBAKU: Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang merembet ke bangunan sekolah.

RADAR SIDOARJO.ID

Kebakaran Dapur Rumah...

diketahui milik Muhammad Anshor.

Danton Damkar Krian, Widi, mengatakan petugas dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran yang melanda dapur rumah warga tersebut. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas ke bangunan di sekitarnya.

"Petugas segera melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan api, terlebih karena kebakaran tersebut merembet hingga ke bangunan TK Islam Qairinah," ujar Widi.

Berdasarkan data sementara, luas bangunan rumah diperkirakan sekitar 12 x 25 meter, sedangkan area yang terbakar mencapai sekitar 6 x 8 meter. Petugas melakukan penanganan untuk mencegah api menjalar lebih luas dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, proses pemadaman berlangsung kurang lebih satu jam sejak kebakaran dilaporkan terjadi.

Terkait penyebab kebakaran, Widi mengatakan masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib.

"Penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan lebih lanjut," tutup Widi. **(sur/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sesar Waru Berpotensi Picu Gempa

KOTA-Ancaman gempa bumi dari Sesar Waru tak boleh dipandang sebelah mata. Patahan aktif yang menjadi salah satu sumber gempa terdekat dengan wilayah Sidoarjo itu teridentifikasi berpotensi memicu gempa bumi hingga magnitudo 6,8. Masyarakat pun diimbau meningkatkan kesiapsiagaan tanpa perlu panik berlebihan.

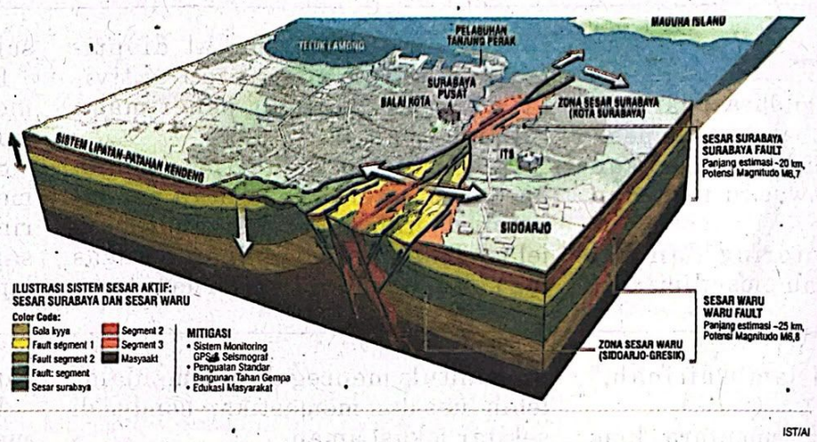
Potensi tersebut terungkap dalam kajian terbaru Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) tahun 2024 yang memetakan berbagai sumber bahaya kegempaan di Indonesia.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas III Malang Ricko Kardoso menjelaskan, penetaan tersebut menjadi dasar penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi.

Hal itu disampaikan Ricko saat kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Malang di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, Sabtu (17/10).

Menurut dia, informasi mengenai potensi gempa bumi harus disikapi dengan langkah mitigasi yang tepat.

● Ke Halaman 10



IST/AI

PATAHAN: Sesar Waru berpotensi picu gempa di Sidoarjo.

Digitized by Arsip Digitized with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

Sesar Waru...

Sebab, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara pasti waktu, lokasi, dan kekuatan gempa bumi yang akan terjadi.

"Yang ada saat ini adalah perhitungan potensi. Keberadaan potensi inilah yang harus kita respons dengan kesiapsiagaan, mengenali apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah gempa bumi terjadi," jelasnya.

Ricko juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu atau kabar burung mengenai prediksi gempa bumi dalam waktu dekat. Masyarakat diminta tetap tenang dan mengacu pada informasi resmi BMKG.

Dia menegaskan, kegiatan SLG menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman gempa bumi dan tsunami.

Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap kedua bencana tersebut, edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara masif sebelum bencana terjadi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Sabino Mariano menyatakan, pihaknya telah bergerak mengantisipasi potensi ancaman dari Sesar Waru dan Sesar Surabaya.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengintensifkan edukasi mitigasi bencana secara langsung kepada masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan jaringan sekolah.

Edukasi tersebut akan dipriotaskan di wilayah yang dilintasi sumber patahan atau sesar aktif. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memahami risiko di lingkungannya sekaligus mengetahui langkah penyelamatan diri ketika gempa bumi terjadi.

"Sesuai informasi dan kajian dari BMKG, kita harus mengantisipasi potensi Sesar Waru dan Sesar Surabaya. Kami akan melakukan edukasi teknis secara langsung ke masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana," ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Moh Bahrul Amig menegaskan, informasi dari BMKG harus menjadi pijakan dalam memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

Menurut dia, data dan kajian kebencanaan bukan sekadar perkiraan, melainkan informasi penting untuk mendukung pengambilan kebijakan sekaligus melindungi keselamatan warga.

"Keselamatan nyawa warga Sidoarjo dari ancaman bencana tektonik menjadi prioritas utama kami," tegasnya.

Dia mengingatkan, posisi geografis Sidoarjo yang berada di kawasan dengan potensi kebencanaan di Jawa Timur menuntut semua pihak untuk tidak bersikap acuh tak acuh.

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

AKBP Bobby Resmi Jabat Kapolresta Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Polresta Sidoarjo menggelar upacara *Farewell Parade*, Minggu (18/10). Upacara itu dalam rangka menyambut AKBP Bobby A. Condroputra sebagai Kapolresta Sidoarjo, serta melepas Kombespol Christian Tobing untuk selanjutnya menjalankan tugas di SSDM Polri.

Kegiatan berlangsung di Mako Polresta Sidoarjo, diikuti seluruh pejabat utama Polresta Sidoarjo, para Kapolsek jajaran, personel, ASN dan Bhayangkari.

Sebelum memasuki gerbang Mako Polresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra beserta istri diberi penghormatan pedang upacara dan disambut Wakapolresta Sidoarjo AKBP Fahrian Saleh Siregar. Kemudian melangkah melewati pasukan pedang pora hingga disambut Kombes Pol Dr. Christian Tobing beserta istri.

Kemudian prosesi dilanjutkan dengan laporan kesatuan dalam rangka serah terima jabatan Kapolresta Sidoarjo.

Kombespol Christian Tobing menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat utama Polresta Sidoarjo, para Kapolsek, anggota, ASN beserta jajaran atas dukungan dan kerja sama selama dirinya menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo.

Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus menjaga soliditas dan integritas dalam menjalankan tugas serta mempertahankan tali silaturahmi.

Sementara itu, AKBP Bobby A. Condroputra menyampaikan bahwa program-program positif yang telah dijalankan pejabat sebelumnya akan tetap dilanjutkan dan dioptimalkan. Terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.



Upacara *farewell* menyambut Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra dan melepas Kombespol Christian Tobing.

Ia juga memohon dukungan seluruh Pejabat utama Polresta Sidoarjo, anggota dan Polsek jajaran dalam menjalankan tugas dan menjaga situasi kamtibmas. **(sud/jok/fdn)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Sidoarjo Dibekali Pemahaman Potensi Gempa

Sidoarjo, Memorandum

Sejumlah warga Sidoarjo mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas III Malang, Sabtu (17/10). Berbagai materi disampaikan pada SLG yang digelar di pendopo Delta Wibawa itu.

Mulai dari pemahaman potensi gempa bumi sampai kesiapsiagaan dalam menghadapinya. Peserta SLG 2026 berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari Aparat TNI, Polri, ASN dan masyarakat umum. Jumlahnya 53 peserta.

Kegiatan SLG sehari penuh itu dibuka Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sidoarjo Moch Bahrul Amig, riadir langsung dalam kegiatan itu Kepala Stasiun Geofisika Malang Ricko Kardoso serta Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dan Anggota Komisi V DPR RI Arizal Tom Liwafa yang hadir secara daring.

Mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sidoarjo Bahrul Amig menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyambut baik penyelenggaraan SLG di Kabupaten Sidoarjo.

Menurutnya kegiatan tersebut sangat strategis dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan daerah akan potensi bencana gempa. Disampaikannya bahwa data serta informasi yang disajikan oleh BMKG bukan sekadar perkiraan atau ramalan semata.

Namun merupakan petunjuk arah yang penting bagi keberlangsungan hidup ekonomi dan keselamatan manusia.

"Keselamatan nyawa warga Sidoarjo dari ancaman bencana tektonik menjadi prioritas utama kami. Mengingat posisi wilayah kita berada dalam dinamika potensi kebencanaan di Jawa Timur, kita tidak boleh bersikap acuh," ujar kata Bahrul Amig.



Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas III Malang.

Dia juga mengatakan kewaspadaan potensi bencana gempa bukannya tanpa alasan. Peristiwa bencana gempa bumi berkekuatan besar yang melanda berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi pengingat penting akan dampak destruktif bencana tektonik.

Kita tidak bisa menghentikan gempa bumi terjadi, tetapi kita bisa menekan dampaknya seminimal mungkin. Kuncinya terletak pada edukasi berkelanjutan dan kesadaran masyarakat agar senantiasa siap dan tanggap menghadapi segala kemungkinan," lanjutnya.

Dikatakan juga bahwa guncangan gempa yang kerap merambat hingga ke pemukiman warga kerap memicu kepanikan massal. Oleh karena itu, pentingnya SLG seperti ini yang dapat mengedukasi masyarakat Sidoarjo agar siap dan tanggap menghadapi potensi bencana.

Untuk itu ia meminta para peserta dapat aktif membagikan ilmu dan keterampilan yang didapat dalam SLG kepada keluarga serta lingkungan tempat tinggal masing-masing.

"Mari kita ubah rasa takut dan panik masyarakat menjadi kesiapsiagaan nyata. Saya berharap para peserta dapat meneruskan materi edukasi ini kepada keluarga mereka, sehingga masyarakat Sidoarjo senantiasa siap dan tanggap menghadapi potensi bencana," pungkasnya.

Kepala Stasiun Geofisika Malang Ricko Kardoso mengatakan kegiatan SLG diselenggarakan sebagai langkah meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana kegempaan.

Dikatakannya pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami yang tergolong rawan terjadi seluruh daerah di Indonesia.

"Kegiatan ini sangat penting. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Karena itu, sebelum bencana terjadi, langkah kesiapsiagaan sangat perlu dilakukan secara masif, salah satunya melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi ini," ujarnya.

Ricko juga mengungkapkan peta kerawanan di wilayah Sidoarjo. Disampaikannya bahwa berdasarkan kajian terbaru dari Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) 2024, telah terpetakan berbagai sumber bahaya kegempaan di Indonesia.

Salah satu sumber gempa bumi terdekat yang melintasi wilayah Sidoarjo adalah Sesar Waru. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Sesar Waru diidentifikasi memiliki potensi memicu gempa bumi hingga magnitudo 6,8. Meski demikian, BMKG meminta masyarakat untuk tidak panik secara berlebihan melainkan fokus pada langkahlangkah mitigasi.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu memantau informasi resmi dari BMKG. *Jangan mudah percaya dengan isu atau kabar burung yang menyebutkan bahwa gempa bumi dapat diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat," tegasnya. (sud/jok/fdn)*

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BPD MLIRIPROWO

PROTES KADES: Warga memasang spanduk di kendaraan operasional desa dalam aksi demonstrasi menuntut transparansi APBDes Kamis (15/10).

Kejaksaan Usut Dugaan Penyelewengan APBDes Mliriprowo

BPD Soroti Penggunaan Dana Rp 621 Juta

SIDOARJO – Keluhan perangkat Desa Mliriprowo, Tarik, soal tunjangan yang mandek 10 bulan berbuntut panjang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengusut dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang berdampak pada keluhan masyarakat. Berkas hasil audit Inspektorat Pemkab Sidoarjo kini tengah didalami untuk dicocokkan dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Kasipidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo mengatakan, pihaknya masih memeriksa berkas hasil audit Inspektorat yang diterima bulan lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum perkara ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. "Jika sudah selesai pemeriksaan, nanti akan segera kami naikkan ke penyelidikan," ujarnya kemarin (18/10).

Sigit menjelaskan, berkas audit tersebut akan dicocokkan dengan sejumlah bukti yang sebelumnya dikumpulkan tim kejaksaan dari Pemdes Mliriprowo. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan awal untuk membantu pendalaman perkara. Kejaksaan berencana memanggil saksi lanjutan. Yakni Ketua BPD Mliriprowo M. Sobri Jaelani dan Kepala Desa (Kades) Mamok Widodo.

Penggunaan Anggaran Desa Bermasalah

Di sisi lain, BPD Mliriprowo menyoroti sejumlah penggunaan anggaran desa yang dinilai bermasalah. Ketua BPD Mliriprowo M. Sobri Jaelani menyebut, akumulasi anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp 621 juta. Persoalan tersebut mencakup pembangunan gorong-gorong di RW 04 senilai sekitar Rp 125 juta yang menurutnya belum terealisasi, dana Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), tunjangan perangkat desa, hingga dana tim pelaksana kegiatan (TPK).

Sobri mengatakan, anggaran pembangunan gorong-gorong tersebut seharusnya digunakan untuk merealisasikan proyek di lingkungan RW 04. Namun, dia mengklaim pembangunan belum dilakukan meski anggaran telah dialokasikan. "Sudah ada surat pernyataan untuk mengembalikan, tetapi sampai sekarang belum selesai," ujarnya. **(ful/hen)**

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Kalah Banding Lawan Pemkab, Warga Mutiara Regency Ajukan Kasasi

Sengketa Pembangunan Akses Perumahan

SIDOARJO – Sengketa masalah pembangunan akses dan pembongkaran tembok antara warga Mutiara Regency dan Pemkab Sidoarjo belum berakhir. Setelah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), warga Mutiara Regency kalah banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Kini, warga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kuasa Hukum Warga Mutiara Regency Dimas Yemahura Alfarouq mengatakan, pengajuan kasasi sudah diproses. Menurutnya, hakim PTTUN tidak melihat perkara secara objektif. "Saya menilai hakim tidak melihat secara gamblang. Padahal dari hakim tingkat pertama menjelaskan ada tindakan represif bupati dan pemkab dalam pembongkaran," katanya.

Dalam memori kasasinya, Dimas meminta hakim agung agar memeriksa perkara dengan berimbang. "Kami ingin lebih objektif dalam menilai agar lebih adil bagi masyarakat," paparnya.

Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo I Komang Rai Hermawan mengatakan, pemkab sudah menerima salinan putusan dari PTTUN. "Dengan ini kewenangan membuka tembok untuk akses jalan ini sah secara hukum, sesuai putusan PTTUN Surabaya," katanya.

Meski ada kasasi, Komang berharap pembangunan jalan tetap berlanjut. "Kami optimistis pembangunan tetap jalan. Ini untuk kepentingan masyarakat umum," jelas Komang. **(eza/hen)**



ANGGER BONDAN/JAWA POS

POLEMIK: Akses Mutiara Regency-Mutiara City masih ditutup seng kemarin (18/10). Sengketa terkait pembangunan akses berlanjut ke Mahkamah Agung.

Scanned with CamScanner

Jawa Pos

Sudah Berdiri, 135 Gerai KDKMP Belum Beroperasi

PERKEMBANGAN GERAI KDKMP

- Gerai terbangun 207
- Belum beroperasi 135 gerai
- Sudah dibuka 72 gerai

Sumber: Dinkopum Sidoarjo



Gara-Gara Suplai Barang Seret

> Selain angkutan, sebagian koperasi juga masih menunggu pasokan barang yang belum dikirim."
>
> **Mochammad Hudori**
> *Kepala Dinkopum Sidoarjo*



SIDOARJO – Belum semua gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Delta beroperasi. Dari total 207 gerai yang terbangun, baru 72 yang beroperasi. Sebanyak 135 gerai masih belum dibuka hingga kemarin (18/10).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Sidoarjo Mochammad Hudori mengakui masih adanya gerai yang belum dioperasikan. Itu karena sejumlah hal. Ada koperasi yang masih menunggu kendaraan operasional dari pemerintah pusat.

"Selain angkutan, sebagian koperasi juga masih menunggu pasokan barang yang belum dikirim," kata Hudori. Dia menegaskan, gerai yang belum dibuka juga masih menjalani verifikasi dan validasi (verval). "Seluruh gerai harus diverifikasi dan divalidasi sebelum beroperasi," tambah Hudori.

Hudori mengatakan, manajer yang belum bisa mengoperasikan gerai tetap diminta aktif mempersiapkan keanggotaan koperasi. Sebab, keberadaan koperasi tidak cukup hanya ditopang bangunan fisik, tetapi juga membutuhkan anggota yang aktif agar kegiatan usaha dapat berjalan.

Surati Pengurus RT/RW

Para manajer didorong menjaring anggota di desa dan kelurahan masing-masing sembari menunggu kesiapan operasional. Dinkopum Sidoarjo juga telah menyurati pihak terkait agar ketua RT, ketua RW, hingga aparatur sipil negara (ASN) ikut bergabung menjadi anggota KDKMP. "Kami juga membantu agar semakin banyak anggota yang bergabung, kalau awal-awal bisa 100 anggota itu sudah sangat bagus," ujarnya.

Selain persoalan kesiapan operasional, pembangunan gerai juga masih menghadapi kendala lahan. Hudori menyebut, lebih dari 100 gerai belum terbangun karena faktor ketersediaan tanah. Pihaknya masih berupaya mencari lokasi strategis agar gerai mudah dijangkau masyarakat. "Kalau sampai tahun depan belum ketemu kemungkinan tidak dibangun, cukup di balai desa," terangnya. **(ful/hen)**

Digandai dengan CamScanner

Jawa Pos



Farewell parade Kapolresta Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Diganti AKBP Bobby A Condroputra

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo menggelar upacara Farewell Parade dalam rangka pisah sambut Kapolresta Sidoarjo, Minggu (18/10/2026). Kegiatan ini menjadi momen penyambutan AKBP Bobby A. Condroputra sebagai Kapolresta Sidoarjo yang baru, sekaligus melepas Kombes Christian Tobing yang selanjutnya bertugas di SSDM Polri.

Upacara yang berlangsung di Mako Polresta Sidoarjo tersebut diikuti pejabat utama Polresta Sidoarjo, para kapolsek jajaran, personel kepolisian, aparatur sipil negara (ASN), serta Bhayangkari.

Sebelum memasuki gerbang Mako Polresta Sidoarjo, AKBP Bobby A. Condroputra bersama istri menerima pengalungan bunga. Keduanya disambut Wakapolresta Sidoarjo AKBP Fahrian Saleh Siregar.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tradisi pedang pora. Bobby dan istri berjalan melewati barisan pedang pora sebelum disambut Kombes Christian Tobing beserta istri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan laporan kesatuan dalam rangka serah terima jabatan Kapolresta Sidoarjo. **(cat/rus)**

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

dengan masyarakat. ... pada Pemilu 2029. [dre]

Fraksi PDIP Sebut Gaji ASN Lewat Kopdes Bisa Ganggu Birokrasi



sawawi/bhirawa

Hj. Zeiniye, S.Ag. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PPP, saat menghadiri Dies Natalis ke-21 SMKN 1 Kendit, Sabtu (17/10).

Anggota DPRD Jatim Asal PPP Sebut SMK Solusi Tekan Angka Pengangguran

Situbondo, Bhirawa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Zeiniye, S.Ag menghadiri perayaan Dies Natalis ke-21 SMK Negeri 1 Kendit, Kabupaten Situbondo, Sabtu (27/10).

Dalam sambutannya, ia mengapresiasi berbagai capaian prestasi yang telah diukir oleh sekolah tersebut. Hj. Zeiniye menyampaikan bahwa meskipun secara regulasi pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (Disdik), namun kabupaten kolaborasi dan sinergi antar-jenjang pendidikan sangat diperlukan dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-21 SMKN 1 Kendit. Sekolah ini ibarat 'bintang' meski letaknya agak masuk dan mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, ternyata menyimpan potensi luar biasa dan telah mengukir banyak prestasi," ujar Hj. Zeiniye.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jawa Timur IV (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) ini menegaskan pentingnya peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.

Menurutnya, Pemprov Jatim saat ini terus mendorong pengembangan SMK agar lulusannya siap kerja dan mampu berwirausaha.

"SMK adalah salah satu solusi strategis untuk mengatasi pengangguran. Tolok ukur kesuksesan saat ini bukan hanya menjadi ASN atau menduduki jabatan di pemerintahan, tetapi sejauh mana seseorang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menggerakkan roda perekonomian," tegasnya.

Ia juga mengajak para siswa untuk terus mengasah keterampilan (skill) dan memanfaatkan teknologi informasi secara positif agar mampu bersaing di era digital.

"Perayaan Dies Natalis ke-21 ini diharapkan menjadi momentum bagi SMKN 1 Kendit untuk semakin menunjukkan bakat, talenta, dan potensi para siswanya kepada masyarakat luas," pungkas Ketua DPC PPP Situbondo, tiga periode itu. **[awi.dre]**

DPRD Jatim, Bhirawa

Wacana Kementerian Koperasi yang meminta gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dibayarkan melalui Koperasi Merah Putih dinilai kebijakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Penegasan ini dikatakan Ketua Komisi E dari Fraksi PDI Pperjuangan (PDIP) DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno.

Menurutnya penataan penyaluran gaji ASN yang berjalan saat ini, melalui bank daerah untuk ASN tingkat daerah dan bank Himbara untuk ASN pusat, sudah sangat baik dan ideal.

"Banyak hal yang masih belum ada kesiapan bila pembayaran gaji ASN dilakukan di Koperasi Merah Putih. Ini akan menimbulkan kegaduan bila dipaksakan," ujar Untari, Minggu (18/10).

Kata mantan Ketua Dekopin ini, ada beberapa alasan mendasar mengapa wacana ini dinilai belum tepat untuk diterapkan. Pertama kapasitas pengurus belum memadai, dimana pengurus Koperasi Merah Putih dinilai masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dan menjalankan tugas kepengurusan dengan baik.

Kedua, minimnya pengalaman manajemen di lapangan, dimana manajemen yang telah dilatih masih belum banyak terjun langsung ke wilayah koperasi masing-masing secara optimal.

Lalu yang lainnya lanjut politisi senior PDIP ini, infrastruktur belum siap. Pasalnya dari kondisi dilapangan, kesiapan infrastruktur perkoperasian Merah Putih belum memadai, karena sebagian besar baru melakukan praktik di beberapa atau belasan koperasi saja dari ribuan koperasi yang ada.

"Ini bila dipaksakan akan berpotensi mengganggu rutinitas penerimaan gaji ASN di tingkat desa atau daerah yang biasanya berjumlah belasan orang (baik PNS, P3K, maupun PKWT)," tegasnya.

Melihat berbagai kendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang ada, Sri Untari meminta Kementerian Koperasi untuk mengkaji ulang serta menelaah kembali pandangan dan wacana tersebut.

Untari berharap para ASN dapat terus bekerja secara tenang dan optimal sesuai dengan sistem perbankan yang selama ini sudah mapan di masing-masing daerah, guna menghindari potensi kendala yang justru dapat merepotkan berbagai pihak. **[geh.dre]**

HARIAN Bhirawa

Dampingi Menko Pangan Tinjau KDKMP Desa Tambakrejo Waru, Wabup Sidoarjo Tegaskan Komitmen Pemkab Sidoarjo Dukung Kemajuan Kopdes Merah Putih

Meja Redaksi · 3 Min Baca
Oktober 16, 2026



Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Sidoarjo, eksklusif.co.id I 15-10-2026
Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,

Meninjau langsung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis, (15/10/2026).

Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk melihat langsung KDKMP Desa Tambakrejo itu beroperasi.

Dalam kunjungannya ia juga pastikan stok barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi yang dijual di Kopdes Merah Putih Tambakrejo itu telah terpenuhi.

Kunjungannya siang tadi dilakukan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SUBANDI DORONG 16 SEKOLAH ADIWIYATA JADI PELOPOR INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH

Oktober 16, 2026 NEWS





SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong 16 sekolah penerima Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo 2026 menjadi pelopor inovasi pengelolaan lingkungan. Penghargaan ini diharapkan melahirkan perubahan nyata melalui pembiasaan hidup bersih, pemilahan sampah, dan kepedulian lingkungan sejak dini.

"Langkah ini tentunya berdampak pada tumbuhnya sumber daya manusia (SDM) yang peduli lingkungan sekaligus mewujudkan Sidoarjo yang bersih, indah, dan asri," ujar Subandi saat menyerahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sidoarjo 2026 di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Jumat (16/10/2026).

NEWS

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMBEBASAN LAHAN FLYOVER GEDANGAN MASUK TAHAP PENETAPAN LOKASI

Oktober 16, 2026 NEWS







SIDOARJO, KABARGRESS.COM – Pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan, Sidoarjo, terus berproses. Setelah pemetaan garis geometris jalan rampung, pemerintah bersiap memasuki tahap penetapan lokasi (penlok) sebagai dasar pengadaan lahan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyelesaikan pengukuran titik koordinat di kawasan persimpangan Gedangan. Tahap ini menjadi acuan awal untuk memastikan kesesuaian peta perencanaan antarinstansi.

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SUBANDI SIAPKAN SANKSI TEGAS, TUNGGAKAN RETRIBUSI PARKIR SIDOARJO CAPAI RP900 JUTA

Oktober 16, 2026 NEWS





Home ADVERTORIAL NEWS OTOMOTIF REDAKSI EKBIS

yang mencapai sekitar Rp900 juta menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan sekitar 80 persen titik parkir tercatat masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan.

Subandi meminta juru parkir memenuhi target setoran sesuai ketentuan. Petugas yang mengabaikan kewajiban akan mendapat surat peringatan hingga berujung pemberhentian apabila tidak mengindahkan teguran.

Meski diberhentikan, kewajiban pelunasan tunggakan tetap harus diselesaikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pergantian petugas tidak menghapus tanggung jawab atas retribusi yang belum disetorkan.

NEWS

Apel Jukir Sidoarjo, Bupati Subandi Tegaskan

ketik.com
Media Kolaborasi Indonesia

Nusantara | Daerah | Internasional | Politik & Pemerintahan | Hukum & Kriminal | Ekonomi & Bisnis



Bupati Subandi menghampiri dan merangkul para juru parkir setelah apel jukir di parkir timur GOR Delta Sidoarjo pada Jumat (16 Oktober 2026). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Politik & Pemerintahan

Aa AA

KETIK, SIDOARJO – Tukang parkir harus benar-benar melayani. Mencari nafkah untuk keluarga dari rezeki halal sebagai juru parkir (jukir). Pemkab Sidoarjo berbagi pendapatan 60 : 40. Jukir diminta disiplin bekerja dan setor pendapatan. Sopan ke pemilik kendaraan. Kalau ada yang tidak disiplin, Bupati Subandi memerintah Dinas Perhubungan Sidoarjo memberhentikan saja mereka. Cari Peta Wilayah

"Tidak perlu peringatan sampai 3 kali. Cukup diperingatkan 2 kali, kalau tidak mau disiplin, keluarkan saja," tegas Bupati Subandi saat menjadi pembina apel juru parkir Sidoarjo di Parkir Timur GOR Delta pada Jumat (16 Oktober 2026).

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

JUMLAH INOVASI SIDOARJO NAIK JADI 382, BUPATI SUBANDI MINTA BERDAMPAK KE MASYARAKAT

10/16/2026 REDAKSI



Newmemojatim, SIDOARJO, 15/10/2026 Semakin banyak inovasi lahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah inovasi meningkat dari 262 pada tahun 2025 menjadi 382 pada 2026. Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta setiap inovasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi.

Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Subandi; saat memberikan sambutan pada acara Apresiasikan Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026). Subandi mengatakan, tantangan pembangunan Kabupaten Sidoarjo semakin kompleks.



Sejumlah persoalan masih menjadi perhatian. Di antaranya tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, sebesar 6,49 persen. Angka kemiskinan 4,40 persen. Prevalensi stunting yang naik dari tahun sebelumnya 8,4 persen menjadi 10,6 persen, serta indeks lingkungan hidup 62,37. Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus mengembangkan inovasi. Tidak sekadar menjadikannya sebagai pemenuhan laporan administrasi. "Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.

Subandi juga meminta perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya untuk segera melakukan evaluasi. Ada tujuh perangkat daerah yang tercatat belum melaporkan inovasi. Di sektor pendidikan, Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan out door learning (ODL) dan menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026.

Kebijakan itu menyusul adanya laporan mengenai pelaksanaan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua. "Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan," ujarnya. Persoalan stunting juga menjadi perhatian Subandi. Ia meminta penanganannya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan OPD terkait.

Tanggapan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Terkait Alih Fungsi Hutan Kota

1 menit membaca View : 8

admin
POLITIK - 17 Okt 2026



TRENDING #5 UHT Jadi Pusat Kolaborasi Teknologi Maritim Internasional, Waka BRIN Buka Sesi Keynote Speaker Hari Ke.

PENA INDONESIA
INFORMASI JERNIH UNTUK INDONESIA

Cari sesuatu...

Beranda Nasional Daerah Pemerintahan Politik Hukum dan Kriminal Lainnya Indeks Berita



Oplus_16908288

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Rencana ke depan terkait alih fungsi hutan kota yang terletak di jalan pahlawan tepatnya di samping kantor PDAM Delta Tirta Sidoarjo, untuk dijadikan akses jalan menuju akses apartemen mendapat tanggapan dari anggota komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sabtu (17/10/2026).

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, Achmad Muzayin Syafrial

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAHAN / Detail Berita

Bupati Subandi Sidak Liponsos Sidoarjo, Pastikan Layanan dan Kesehatan Penghuni Terjamin



Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: **Mujianto Primadi** • Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:15 WIB • 127 kali dibaca



SIDOARJO, (PojokTv.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat membenahi sarana dan prasarana di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo. Tak hanya perbaikan fisik, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan program pemberdayaan bagi warga binaan yang dinyatakan sembuh.

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jukir Nakal di Sidoarjo Nunggak Utang Rp900 Juta, Bupati Subandi Tegaskan Dua Kali Peringatan Langsung Pecat dan Laporkan



Foto: Dokumentasi Redaksi PojokTV

Oleh: **Mujianto Primadi** • Jumat, 16 Oktober 2026 | 09:47 WIB • 202 kali dibaca



SIDOARJO, pojoktv.com – Peringatan keras bagi para juru parkir (jukir) nakal di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo memastikan tidak akan memberi toleransi lagi bagi jukir yang kerap menunggak setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bersikap arogan di lapangan. Tak tanggung-tanggung, akumulasi tunggakan utang setoran jukir nakal di Sidoarjo saat ini tercatat mencapai Rp900 juta.